



**PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA
DALAM KERANGKA SINERGITAS BADAN
NARKOTIKA NASIONAL DENGAN UNSUR-UNSUR
SISTEM
PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Dua (S-2) Pada Magister Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta**

KEMBAR WAHYU SUSILO

1710622033

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Kembar Wahyu Susilo

NRP : 1710622033

Tanggal : April 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



Kembar Wahyu Susilo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kembar Wahyu Susilo
NRP : 1710622033
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pemberantasan Peredaran Narkotika Dalam Kerangka Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Unsur-Unsur Sistem Peradilan Pidana

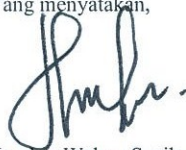
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : April 2019

Yang menyatakan,



Kembar Wahyu Susilo

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Kembar Wahyu Susilo
NRP : 1710622033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pemberantasan Peredaran Narkotika Dalam Kerangka Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Unsur-Unsur Sistem Peradilan Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Eni Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Dra. H. Laily Washliaty, SH., M.Hum
Penguji / Pembimbing I



Dr. Mohammad Hatta, SH., MKn
Penguji / Pembimbing II



Dwi Desi Yaya Tarina, SH., MH
Dekan



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 2019

**PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DALAM KERANGKA
SINERGITAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN
UNSUR-UNSUR SISTEM PERADILAN PIDANA**

KEMBAR WAHYU SUSILO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan pemberantasan peredaran narkotika tidak dapat berjalan maksimal sedangkan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas. Penelitian ini pun untuk mengetahui bentuk-bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia dan kendala-kendala penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana/*penal policy*) dan teori negara hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik meskipun ketentuan pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan adanya dualisme dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika karena adanya dualism antara Penyidik Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana masing-masing Penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan narkotika adalah koordinasi yang erat antar pimpinan BNN dan POLRI sebagaimana telah diatur secara tegas pada Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia adalah kewenangan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik BNN berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika.

**ERADICATION OF CIRCULAR CIRCULATION IN THE SYNERGITY
FRAMEWORK OF THE NARCOTIC NATIONAL AGENCY WITH
ELEMENTS OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

KEMBAR WAHYU SUSILO

ABSTRACT

This research was conducted to find out the reasons for the eradication of narcotics circulation that cannot run optimally while the criminal regulation in Law Number 35 of 2009 has been clearly and explicitly determined. This research is also to find out the forms of synergy between the National Narcotics Agency and the sub criminal justice system in an effort to eradicate drug trafficking in Indonesia and the obstacles in implementing synergy or cooperation in combating narcotics circulation.

The theory used in this research is the theory of criminal law policy (criminal law politics / reasoning policy) and legal state theory.

The research method used in this thesis is analytical descriptive research, by describing the applicable laws and regulations and is associated with legal theories in the practice of implementation.

The results of this study conclude that efforts to eradicate narcotics circulation in Indonesia cannot work well even though the criminal provisions have been explicitly regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics due to dualism in the resolution of Narcotics and Narcotics Precursors due to dualism between Acting Investigators Narcotics Criminal and Narcotics Precursors are authorized to disclose the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors where each Investigator feels entitled to carry out an investigation which is not impossible to ultimately harm or hinder the process of eradicating the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors. The form of synergy between the National Narcotics Agency and the criminal justice sub-system in an effort to combat narcotics is close coordination between BNN and POLRI leaders as explicitly regulated in Article 41 paragraph (2) of the Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency. Constraints faced in the application of synergy or cooperation in combating narcotics circulation in Indonesia are the arrest authority of people suspected of misuse and dark apprehension of Narcotics and Narcotics Precursor BNN Investigators based on Article 76 of the Narcotics Act.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Di dalam tesis ini, penulis dengan rendah hati mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan, hal ini tiada lain karena keterbatasan kemampuan dan adanya kesulitan-kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun, berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak yang sangat berarti, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga,

1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH
3. Yth. Ketua Jurusan Hukum, Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
4. Yth. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I
5. Yth. Bapak Dr. Mohammad Hatta, SH.,MKn, selaku Pembimbing II.

Semoga segala bantuan dan amal kebaikan semua pihak mendapatkan pahala dan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, April 2019

Penulis



Kembar Wahyu Susilo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional	25
2.2 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	44
2.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	44
2.2.2 Sistem Peradilan Pidana Terpadu.....	54
2.2.3 Kedudukan BNN Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	61
2.2.4 Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan BNN.....	66
2.2.5 Masalah Kompetensi Kewenangan Penyidikan	79
BAB III METODE PENELITIAN	87
3.1 Tipe Penelitian	87
3.2 Sifat Penelitian	87
3.3 Sumber Data.....	88
3.4 Pengumpulan dan Analisa Data	88
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	91
4.1 Sinergitas BNN pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	91
4.2 Sinergitas BNN Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia	100
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xiii